BERITA LINGKUNGAN HIDUP

Surat Kabar : Suara Pembaruan
Subyek : Lumpur Lapindo
Edisi : 30 Januari 2008
Halaman : 6

Fakta Lumpur Lapindo Harus Dibuka

[JAKARTA] Permasalahan lumpur Lapindo yang tidak terselesaikan sampai saat ini telah menelan biaya yang sangat besar dan tidak akan tuntas tanpa adanya kesadaran dari Pemerintah untuk mengambil alih masalah tersebut. Selain itu, fakta yang ada harus dibuka, jangan ditutup-tutupi

Hal itu dikemukakan para pakar di bidang perminyakan, pengeboran, dan geologi pada forum diskusi yang diselenggarakan oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), di Jakarta, Selasa (29/1).

Mantan ketua tim investigasi independen Luapan Lumpur Lapindo, Rudi Rubiandini, mengatakan, semburan lumpur Lapindo bukan merupakan bencana alam seperti yang digembar-gemborkan selama ini. Ia menegaskan, seruan beberapa pihak yang berusaha mengarahkan gempa sebagai penyebab luapan lumpur merupakan hal yang sama sekali tidak benar.

"Faktanya sudah sangat jelas, semburan yang terjadi di lokasi pengeboran minyak Lapindo merupakan kecelakaan saat proses pengeboran," tutur Rudi. Ia mengaku tidak habis pikir mengapa beberapa pihak berusaha membelokkan pendapat bahwa semburan lumpur menjadi sebuah fenomena lumpur gunung api (*mud volcano*) akibat gempa di Yogyakarta.

Anggota Timnas Penanggulangan Lumpur Lapindo yang juga pensiunan Pertamina, Kersam Sumanta, mengungkapkan, dari segi perizinan, penentuan lokasi pengeboran serta kualitas sumber daya manusia Lapindo, keseluruhannya tidak memenuhi standar ketentuan operasional pengeboran.

Mantan Ketua Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI), Andang Bachtiar, mengemukakan bahwa persoalan Lapindo ini banyak mengandung muatan politis, sehingga di antara para ahli sendiri isu tersebut sangat jarang dibahas. Andang juga mengatakan, akses terhadap data yang terjadi di lapangan sangat minim, sehingga banyak dari ilmuwan harus mencari data dari pihak kepolisian.

"Apa yang dilakukan Lapindo selama dua tahun seharusnya terbuka untuk umum, karena permasalahan ini menyangkut masyarakat luas. Seharusnya ada forum yang dibuka antara para ahli dan pihak berkepentingan untuk bertemu dalam satu wadah dan berdiskusi sampai tuntas, dengan membawa semua data lengkap. Kalau perlu, kurung tiga hari tiga malam asal kesimpulan yang terbaik dapat dicapai," katanya.

Saat ini banyak korban lumpur Lapindo mengalami stres berat dan dirawat di rumah sakit jiwa, akibat kehilangan tempat tinggal dan tanpa masa depan yang jelas. Selain itu, negara mengalami kerugian sekitar Rp 90 miliar per hari akibat masalah Lapindo. [CAT/S-26]

Perpustakaan Emil Salim
Kementerian Negara Lingkungan Hidup